

# Pelembagaan Tim Koordinasi Daerah (TIKORDA) dalam Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru Daerah Istimewa Yogyakarta

## APA YANG SUDAH DILAKUKAN?

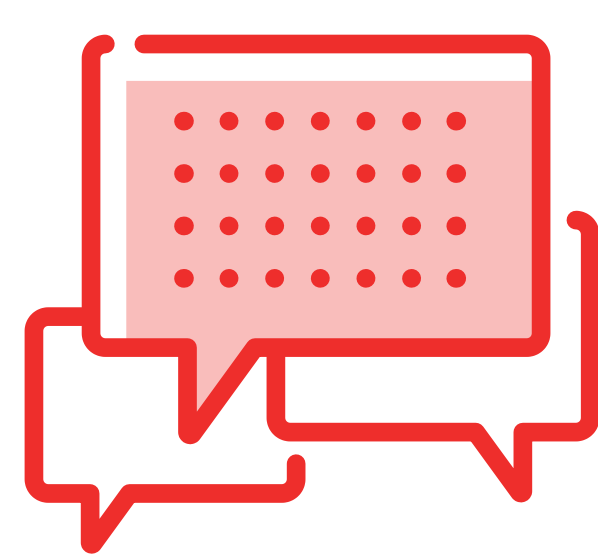
Pelembagaan TIKORDA di Daerah Istimewa Yogyakarta dibangun dalam rangka upaya persiapan dan pencegahan, deteksi, respon, pemulihan hingga evaluasi, khususnya untuk zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru (PIB), baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Selain itu, pelembagaan ini juga menjadi salah satu strategi untuk keberlanjutan program (*sustainability*). Strategi dan proses pelembagaan TIKORDA ini dilaksanakan melalui empat tahapan, yaitu:

1



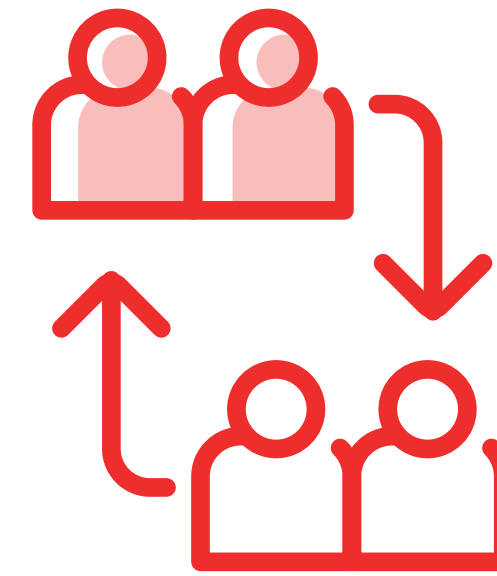
Pembentukan TIKORDA melalui penetapan regulasi atau kebijakan.

2



Penyusunan mekanisme, sistem, dan prosedur termasuk rapat koordinasi, penyusunan rencana kerja TIKORDA oleh dinas terkait, serta evaluasi dan pelaporan.

3



Sinkronisasi program/kegiatan TIKORDA dengan rencana program/kegiatan dan penganggaran dinas terkait.

4



Uji coba aksi bersama lintas sektor (*joint action*) untuk pencegahan dan pengendalian zoonosis dan PIB, seperti surveilans (surveilans terpadu leptospirosis maupun Surveilans Berbasis Masyarakat/PELKA), forum teknis pada level puskesmas dan puskesmas atau kapanewon, serta pemanfaatan data dan laporan situasi penyakit tertentu (*situation report*).

Dalam mendukung proses pelembagaan TIKORDA di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten, dukungan yang diberikan oleh AIHSP kepada pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1

Memfasilitasi advokasi dalam pembentukan TIKORDA di tingkat provinsi dan kabupaten pilot di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kulon Progo dan Gunungkidul. AIHSP memberi dukungan teknis mulai dari advokasi, pengembangan draf surat keputusan, penyusunan rencana kerja TIKORDA dan mekanisme koordinasi, serta sinkronisasi program/kegiatan dengan dinas teknis dalam rangka operasionalisasi kerja TIKORDA dan penyusunan laporan tahunan.

2

Memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung penguatan TIKORDA melalui penguatan kapasitas dinas teknis khususnya dalam tata kelola (*management*) zoonosis dengan pendekatan One Health serta pelatihan komunikasi risiko One Health. Penguatan kapasitas ini diberikan kepada para pengambil kebijakan/pejabat serta staf dari dinas teknis di tingkat provinsi dan kabupaten, hingga pelaksana di tingkat puskesmas dan puskesmas.

3

Dalam rangka memperkuat pencegahan dan pengendalian zoonosis dan PIB, AIHSP memfasilitasi adanya aksi bersama lintas sektor (*joint action*) melalui pengembangan pilot model Forum Teknis Puskesmas-Puskesmas di Kapanewon Nanggulan. Proses pengembangan pilot ini mulai dari pembentukan forum, peningkatan kapasitas untuk surveilans terpadu, penyusunan instrumen pengumpulan data dan format *situation report*, kegiatan praktik lapangan (*joint action*), analisis data hasil surveilans terpadu, hingga penyusunan rekomendasi untuk lintas sektor.

4

Bersama TIKORDA, telah melakukan penguatan deteksi dini zoonosis dan PIB melalui pembentukan Pelapor Kalurahan (PELKA) dalam rangka uji coba Surveilans Berbasis Masyarakat (SBM).

5

Mendukung upaya TIKORDA provinsi dalam pelaksanaan pembinaan TIKORDA di tingkat kabupaten serta memfasilitasi pembinaan dari level nasional untuk TIKORDA provinsi dan kabupaten.

## HASIL KEGIATAN

1

Adanya regulasi pembentukan TIKORDA di tingkat provinsi dan kabupaten:

- Keputusan Gubernur DIY Nomor 81/TIM/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 277/D/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru Kabupaten Kulon Progo.
- Sedangkan untuk Kabupaten Gunungkidul masih dalam proses penyesuaian Satgas One Health menjadi Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru Kabupaten Gunungkidul.

2

Adanya rencana kerja tahunan TIKORDA yang merupakan sinkronisasi dari program/kegiatan dan penganggaran dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian/Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, dsb. Sebagai contoh pelaksanaan rencana kerja tersebut antara lain:

- Beberapa pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi TIKORDA di Kabupaten Kulon Progo telah dibiayai oleh dana APBD Bappeda Kulon Progo dan Dinas Kesehatan Kulon Progo.
- Rakor TIKORDA DIY difasilitasi secara *cost sharing* antara AIHSP dengan Sekretariat TIKORDA DIY (Biro Bina Mental Setda DIY) dan Dinas Kesehatan DIY melalui penganggaran tahun 2024.

3

Adanya pelaporan tahunan TIKORDA.

- Dokumen Laporan Tahunan TIKORDA Kabupaten Kulon Progo tahun 2023 telah disusun dan diserahkan kepada Kemenko PMK dan Kemendagri.

4

Adanya komitmen dan dukungan dari kecamatan/kapanewon di daerah percontohan (Kapanewon Nanggulan) dalam implementasi Forum Teknis Puskesmas-Puskesmas:

- Penandatanganan Berita Acara Pembentukan Forum Teknis Puskesmas-Puskesmas di Nanggulan oleh Panewu Nanggulan beserta Kepala Puskesmas Nanggulan dan Kepala UPT Pelayanan Kesehatan Hewan Wilayah Utara Kulon Progo. Dalam forum ini Panewu Nanggulan bertindak sebagai Ketua Forum.
- Panewu Nanggulan melalui Rapat Koordinasi Lintas Sektor tingkat kapanewon rutin menyampaikan *situation report* hasil analisis/rekomendasi surveilans terpadu sebagai sebuah mekanisme deteksi dini dan pencegahan, terutama kepada para lurah, babinkamtibmas, dan bhabinas.

## PEMBELAJARAN

1

Pembinaan dan konsultasi antar level pemerintahan penting dalam pembentukan dan operasionalisasi TIKORDA, termasuk pembinaan dari Kemenko PMK dan Kemendagri.

2

Pada kondisi normal, tidak ada kejadian luar biasa/wabah, seringkali kesulitan merumuskan rencana kerja TIKORDA. Oleh karena itu, dinas teknis terkait perlu merencanakan program/kegiatan yang dialokasikan untuk kesiapsiagaan bencana atau kejadian luar biasa yang disinkronisasi dengan lintas sektor melalui TIKORDA.